

**PEMBERDAYAAN TATA RUANG LAUT DI KOARMADA I GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN POSTUR TNI DALAM RANGKA PERTAHANAN NEGARA**

***EMPOWERING MARINE SPATIAL GOVERNMENT IN KOARMADA I TO SUPPORT
THE DEVELOPMENT OF THE TNI'S POSTURE IN THE FRAMEWORK OF
NATIONAL DEFENSE***

Benekditus Dwiaji Gultom¹, Dwi Hartono¹, Martinus Dwi A², Haposan Simatupang¹

¹fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Ri
Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

ABSTRAK

Pembangunan kemampuan pertahanan negara melalui pembangunan postur TNI harus mampu bersifat deterrensi strategis dan mobilitas tinggi. Kemampuan pertahanan harus disesuaikan dengan tata ruang pertahanan dimana wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan. Permasalahannya, kesiapan regulasi tata ruang pertahanan berjalan lambat karena berbagai faktor, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur. Diperlukan pemberdayaan yang berdampak pada penataan ruang kawasan pertahanan sesuai dengan konstelasi geografis Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan penataan ruang laut di Komando Armada Pertama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Penelitian dilakukan pada periode Maret-Oktober 2021, dengan lokus penelitian di Jakarta. Objek penelitiannya antara lain Kementerian Pertahanan, Balai Hidrografi Nasional, Komando Armada Pertama dan akademisi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Kartografi dan Analisis Kelautan (*Marine Cartography*), perlu adanya integrasi format data spasial kelautan di setiap unit. Strategi yang dilakukan adalah melalui optimalisasi data dan informasi pemetaan, mewujudkan fasilitas infrastruktur sesuai kondisi geografis Indonesia, peningkatan SDM TNI, optimalisasi kerja sama dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan kelautan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Penataan Ruang Pertahanan Laut

ABSTRACT

The development of national defense capabilities through the development of the Indonesian Arm Force's posture must be capable of strategic deterrence and high mobility. Defense capabilities must be adjusted to the defense spatial layout where the territory of Indonesia is an archipelago. The problem is that readiness in the regulation of defense spatial planning is running slowly due to various factors, both infrastructure and non-infrastructure. Empowerment is needed that has an impact on the spatial management of the defense area in accordance with the geographical constellation of Indonesia. This study aims to analyze strategy of empowering marine spatial planning in the First Fleet Command. The research used qualitative methods through documentation studies, interviews and questionnaires. The research was conducted during the period March-October 2021, with the research locus in Jakarta. Research objects include the Ministry of Defence, National Hydrographyc Office, First Fleet Command and academics. The conclusion of the study shows that there is a need to increase competent Human Resources in the fields of Cartography and Marine Analysis (*Marine Cartography*), it needs for integration of marine spatial data formats in each unit. The strategy carried out is through optimizing mapping data and information, realizing infrastructure facilities according to Indonesia's geographical conditions, increasing Indonesian Arm Forces human resources, optimizing cooperation and participation of all marine stakeholders

Keywords: *Empowerment, Marine Defense Spatial Planning, Indonesian Arm Force's Posture, First Fleet command, National Defense*

1. PENDAHULUAN

Posisi Indonesia secara geo-politik dan geo-strategis tersebut harus didukung dengan berdaulat terhadap wilayah NKRI secara nyata dilapangan sehingga batas-batas wilayah dengan negara tetangga secara nyata dikuasai oleh Indonesia melalui penguasaan yang efektif dan "sea power" yang unggul. Cakupan wilayah Indonesia yang begitu luas dan jumlah pulau yang mencapai ribuan merupakan potensi sekaligus ancaman terhadap negara yang datangnya dari dalam maupun dari luar negeri. Dari ciri negara kepulauan Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 pada Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa : "Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan". Pembangunan ketahanan nasional dirancang dan dirumuskan berdasarkan pemikiran *Illegal egic* Indonesia dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia yang merupakan negara maritim. (Lemhannas RI, 2015). Strategi pertahanan negara kepulauan berbasis maritim untuk menjaga dan melindungi segenap potensi maritim dan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI sekaligus untuk menangkal setiap ancaman terhadap bahaya keamanan dan pertahanan Negara yang datangnya tidak dapat diperkirakan. (Suradinata, 2011).

Kondisi geografis Indonesia menuntut adanya sistem pertahanan yang kuat dan merata. Jika terjadi situasi perang, posisi strategis ini dibutuhkan kerja ekstra dalam mempertahankannya. Rentang wilayah yang begitu luas dan jumlah pulau yang mencapai ribuan memberi banyak pintu masuk bagi pihak yang mempunyai niat bermusuhan

Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 Pasal 2 menjelaskan pembangunan kemampuan pertahanan negara melalui:

a. Implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung.

b. Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.

c. Penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan.

d. Pembangunan postur TNI Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

Strategi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dirumuskan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan TNI dalam konteks penggunaan dan pembinaan. Dalam mewujudkan kebijakan TNI dalam konteks pembinaan strategi yang dilaksanakan dalam pembangunan postur TNI, dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara yang disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pembangunan kekuatan dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi terkini. Pembangunan postur TNI tersebut antara lain meliputi pembangunan bidang-bidang organisasi, personel, materiil/alutsista, dan fasilitas yang termasuk didalamnya (Keputusan Panglima TNI No. Kep/555/VI/2018: h, 20).

Pembangunan kemampuan pertahanan negara melalui pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional merupakan implementasi pembangunan pertahanan negara yang disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

tertanggal 18 Oktober 2019 yang diimplementasikan dengan terbanggunya gelar pangkalan Komando Armada menjadi 3 wilayah yaitu Koarmada Indonesia bagian Barat (Koarmada I), Koarmada Indonesia bagian Tengah (Koarmada II) dan Koarmada Indonesia bagian Timur (Koarmada III). Pembagian ini dilakukan agar kekuatan masing-masing Koarmada dapat dibangun secara efektif sesuai dengan ancaman, doktrin, organisasi, latihan dan gelar pasukan yang sudah ada guna memenuhi kebijakan pemerintah.

Pembangunan kekuatan TNI dengan mencermati geografis NKRI yang ada, perlu penyesuaian pemanfaatan sekaligus mendukung perkembangan daerah kawasan sehingga keberadaan satuan TNI bermanfaat dan berhasil guna dalam mendukung program dan menjamin keamanan pembangunan nasional dan daerah. Kedudukan Indonesia pada posisi silang perdagangan, memiliki empat dari sembilan *Sea Lines of Communication* dunia. Kondisi tersebut mewajibkan (lingstra) merupakan kondisi dan cara pandang negara dalam melihat sebuah masalah atau isu yang berkembang yang berpengaruh terhadap kebijakan strategis negara. (Kementerian Pertahanan RI, 2008).

Konfigurasi geografi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi yang strategis menjadikan Indonesia memiliki 10 perbatasan dengan negara tetangga, beberapa diantaranya masih ada wilayah perbatasan yang belum ditetapkan serta menjadi wilayah perairan yang tumpang tindih dengan negara tetangga. Kondisi tersebut, Indonesia harus mewaspadai adanya kemungkinan kontingensi. Indonesia harus memiliki kesiagaan dan kemampuan untuk dapat mengendalikan lautnya dan memproyeksikan kekuatannya melalui laut dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan lingkungan strategi yang terjadi di Kawasan Indonesia bagian barat saat ini, khususnya panggung besar perebutan eksistensi di kawasan Laut Cina Selatan (LCS) memunculkan banyak isu yang memengaruhi kepentingan

Indonesia menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka-Singapura, serta tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Koarmada I memiliki wilayah kerja yang strategis dimana wilayah kerjanya merupakan wilayah dari Koarmada I, merupakan komando operasi Markas Besar TNI memiliki fungsi dan tugas sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta sebagai penangkal apabila terjadi ancaman. Koarmada I juga memiliki tugas mengantisipasi gangguan keamanan nasional dan diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kerawanan yang timbul, baik itu potensi ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri, termasuk di dalamnya bertindak sebagai kekuatan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Lingkungan strategis nasional Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan integratif darat-udara-laut yang dibangun harus sesuai dengan transformasi paradigma yang berkonsentrasi pada keseimbangan darat-laut-udara yang tepat, perlu dikembangkan baik personil, maupun peralatan pertahanan keamanan, untuk menjaga kedulatan dan mempertahankan negara pada saat Indonesia nantinya menjalankan perannya sebagai Poros Maritim Dunia (Bappenas, 2016). Keberadaan Koarmada I di Kawasan Indonesia bagian barat merupakan implementasi pembangunan postur pertahanan sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi konflik di wilayahnya. Koarmada 1 sebagai komando utama dan komando pembinaan. Koarmada 1 sebagai komando utama operasional, mengoperasionalkan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu Kapal, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan, Panglima Komando Armada-I (Pangkoarmada-I) bertanggungjawab kepada Panglima TNI. Koarmada 1 sebagai komando utama pembinaan, membina kekuatan laut dan pangkalan, bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal). Konsep pertahanan

negara yang dipersiapkan sejak dini dilakukan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dengan tujuan mengintegrasikan dan mensinergikan peran fungsi kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 menegaskan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, disiapkan sejak dini melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan keharusan untuk mendukung

Sistem pertahanan semesta. Pemberdayaan wilayah pertahanan dirancang secara dini untuk menyiapkan rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara sehingga dapat mendukung komponen utama pertahanan negara (Mulyono, 2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penataan ruang selain suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan (Lanya dan Subadiyasa, 2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara menjelaskan dari aspek pertahanan, penataan ruang terkait langsung dengan strategi pertahanan negara, bahkan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan fungsi pertahanan. Implementasi penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dengan tersusunnya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan).

Pengelolaan ruang maritim pada kenyataannya belum mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan pertahanan, juga karena belum didukung oleh paradigma bangsa yang berorientasi maritim, peraturan dan perundang-undangan yang memadai, minimnya sumber daya manusia (SDM)

diarahkan bagi kesejahteraan juga perlu bagi kepentingan pertahanan keamanan. Indonesia sebagai negara kepulauan, maka memerlukan strategi pertahanan negara kepulauan berbasis maritim untuk menjaga dan melindungi segenap potensi maritim dan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI sekaligus untuk menangkal setiap ancaman terhadap bahaya keamanan dan pertahanan negara yang datangnya tidak dapat diperkirakan (Suradinata dan Ermaya, 2011).

Wilayah pertahanan merupakan kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya harus diprioritaskan karena memberikan pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis wilayah Indonesia dimaksudkan untuk mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis wilayah Indonesia demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan, Penataan ruang sebagai

yang profesional, dukungan kelembagaan yang menanganinya belum ada, serta minimnya ketersediaan data/informasi mengenai ruang dan potensi maritim nasional, sehingga menyebabkan sulitnya menerapkan perencanaan pembangunan dan penerapan strategi pertahanan negara di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan belum adanya tata ruang wilayah pertahanan maritim tersebut menimbulkan kerawanan nasional khususnya terhadap aspek pertahanan negara (Wijayanto, 2010). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemberdayaan tata ruang laut di Koarmada I guna mendukung pembangunan postur TNI dalam mewujudkan pertahanan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitiannya ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis diskriptif (Maleong, 2017; Sugiyono, 2018). Pengambilan data primer dilaksanakan melalui wawancara di

lapangan untuk mendapatkan informasi dengan mendatangi informan di lokasi yang telah ditentukan Supardi (2005). Bilamana dalam keadaan wawancara langsung tidak dapat dilakukan maka dilaksanakan melalui *virtual* mengingat penelitian masih dalam masa pandemik Covid 19. Data primer berupa hasil wawancara dalam bentuk deskriptif tertulis/lisan dari perilaku dan orang yang diamati (Strauss and Corbin, 2013).

Penelitian dilaksanakan di Jakarta, pengambilan data primer melalui observasi dan wawancara kepada pejabat instansi yang berkompeten dan mewakili lembaganya, diantaranya Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Pushidrosal, Koarmada I, Dissurpotrud TNI AU dan Akademisi IPB. Penelitian dilaksanakan selama periode April - Oktober 2021.

Agar data penelitian memenuhi kriteria keabsahan, peneliti menggunakan teknik triangulasi teori yaitu membandingkan Informasi hasil penelitian dengan perspektif teori yang relevan untuk bangsa, seperti institusi yang terkait dengan tata ruang laut (KKP, LAPAN, BIG).

Ife dan Tesoriero (2008) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan peran fungsi dalam suatu komunitas menjadi lebih bermutu, maka harus dilakukan pemberdayaan (*empowering*), salah satunya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan. Menurutnya fungsi pemberdayaan mempunyai arti (1) *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain (2) *to give ability to atau to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pendeknya adalah bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan pemberdayaan wilayah.

Pembangunan sistem informasi bagi pemberdayaan tata ruang laut di Kormada I guna mendukung postur TNI saat ini adalah bahwa informasi adalah faktor utama yang terpenting dalam segala aspek

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan (Raharjo, 2010).

3. HASIL PENELITIAN

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sarana prasarana bagi pemberdayaan tata ruang Laut di Koarmada I hingga saat ini masih menemui beberapa kendala seperti SDM yang mempunyai keterampilan geospasial masih minim, terutama keahlian bidang penginderaan jauh, Cartography dan Marine Analysis (*Marine Cartography*). Oleh karena itu pengiriman SDM (Prajurit dan PNS) untuk belajar tentang geospasial frekuensinya harus terus ditingkatkan, baik pendidikan short course (kursus-kursus pengolahan dan pengelolaan data berbasis *Geographic Information Systems* (GIS) maupun yang bersifat pendidikan pengembangan seperti pendidikan D3, S1, S2 dan S3. Penyediaan SDM harus berprinsip kesemestaan dalam sistem pertahanan, bukan hanya dilingkungan militer saja namun harus semua komponen

perencanaan tata ruang, kelengkapan dan kebenaran sebuah input data akan menentukan kualitas keluaran yang dihasilkan. Oleh karena itu keberadaan SIG menjadi keharusan dalam keseluruhan proses perencanaan tata ruang. Akbar (2014) menyatakan bahwa permasalahan tata ruang di Indonesia, secara garis besar menyangkut 4 (empat) hal yaitu:

- a. Perkembangan penduduk yang mengharuskan peningkatan kebutuhan lahan/ruang
- b. Pembangunan sangat ditentukan oleh kekuatan pasar daripada perencanaan strategis
- c. Hukum dan peraturan tentang tata ruang seringkali tidak tegak lurus dengan peraturan yang di atasnya.
- d. Perencanaan seringkali tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang ada.

Oleh karena itu dalam pembangunan sistem informasi, keempat faktor tersebut harus menjadi alat penyaring, ketika

menentukan kebijakan pemberdayaan tentang tata ruang pertahanan.

Terkait dengan pembangunan sistem informasi di Kormada I guna mendukung postur TNI saat ini dengan memilih teknologi yang tepat yaitu pembangunan sistem informasi harus berbasis Big Data, terkoneksi antara instansi militer baik di lingkungan TNI maupun Kementerian Pertahanan. Informasi yang dituangkan dalam Big Data meliputi bukan hanya menyangkut tata ruang laut saja, namun juga informasi yang ada didalamnya seperti kolom air untuk mendukung operasi kapal selam, informasi area ranjau dan bekas area ranjau dan area pendaratan amfibi serta daerah latihan militer lainnya. Oleh karena itu data hidrografi, menjadi bagian dari pemberdayaan tata ruang laut. Pengembangan system informasi geospasial dapat digunakan juga dalam pengembangan Geografi Intelejen (GEOINT) dengan memanfaatkan analisis citra dan informasi geospasial tentang fitur dan kejadian dengan mengacu kepada ruang (posisi) dan waktu.

Dalam pengelolaan *big data system* kelautan harus mengusung konsep Intelejen harus di tuangkan dalam setiap rencana tindakan kontijensi berdasarkan informasi yang ada di Big data tata ruang laut. Demikian juga dalam menggelar patrol secara efektif Koarmada I menerapkan pola operasi dengan fokus pada daerah-daerah rawan sesuai dengan prediksi ancaman dari Analisa intelejen. Oleh karena itu, peran serta Dispotmar dan Pushidrosal dalam tata ruang laut pertahanan. Dalam hal pemberdayaan tata ruang pertahanan laut kemampuan TNI bersama stakeholder disusun berdasarkan strategi pertahanan negara yang merefleksikan pemanfaatan sumber daya nasional. Gelar kekuatan TNI harus didukung informasi kondisi geografis serta bentuk ancaman operasi yang direncanakan melalui informasi yang diperoleh melalui peta laut maupun peta militer. Pemberdayaan harus melibatkan TNI sebagai Komut dan Komduk seperti Bakamla, KKP, Pemda dan Kelompok Nelayan. Dalam rangka melindungi kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari spektrum

interoperabilitas, dimana permasalahan utama yang menjadi kendala saat ini adalah format data yang berbeda masih dapat di upayakan untuk dirubah kedalam format lain yang sama. Namun yang diharapkan adalah piranti lunak yang dapat mendukung proses kerja dengan menggunakan *Big Data* serta merupakan piranti yang terbaru dan memiliki kapasitas yang tinggi dan besar. *Big data system* kelautan yang digunakan harus terstruktur agar hasil yang diharapkan dari proses pengambilan data, pengolahan data, dan analisis data memiliki value yang sangat baik. Dalam hal pengelolaan data dapat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur menggunakan *data base management system* terbaru sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.

Strategi pemberdayaan tata ruang laut di Koarmada I guna mendukung pembangunan postur TNI dalam mewujudkan pertahanan negara, adalah perlu dibuat suatu SOP yang mengutamakan sinergitas antar satuan TNI dengan mengedepankan prinsip *Interoperability*. Sebuah analisa dari

ancaman yang kompleks, maka perencanaan tata ruang wilayah pertahanan laut juga harus berpedoman pada sistem pertahanan semesta. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Menurut Bastari et al (2018) Sistem pertahanan semesta merupakan pertahanan bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya pandangan tentang pertahanan yang diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan bisa diartikan sebagai seluruh sumberdaya maupun sarana prasarana nasional yang didayagunakan sebagai usaha pertahanan.

Selain itu juga perlunya meningkatkan diplomasi pertahanan terkait tata ruang pertahanan di perbatasan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan pertahanan, mengembangkan sistem pertahanan negara terpadu yang mengintegrasikan

kekuatan darat, laut, dan udara guna meningkatkan efek penggentar melalui teknologi alutsista yang modern. Pemberdayaan tata Ruang Wilayah Laut Nasional harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan pertahanan, mengembangkan sistem pertahanan negara terpadu yang mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara guna meningkatkan efek penggentar melalui teknologi alutsista yang modern. Strategi lainnya adalah dengan melibatkan institusi pemegang data peta digital maupun konvensional dapat diperoleh di Pusat Informasi Geospasial seperti Pushidrosal, BPN, LAPAN, KKP, dan BIG sebagai lembaga resmi penyedia data peta.

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan tata ruang laut di Koarmada I guna mendukung pembangunan postur TNI dalam rangka mewujudkan keamanan dan kesejahteraan NKRI maka dilaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan strategi-strategi yang telah dirumuskan, dengan mempertimbangkan landasan pemikiran dan perkembangan lingkungan strategis. Menurut Hasibuan (2019) bahwa keberhasilan dalam suatu kemampuan besar dalam menampung data informasi geospasial dari keseluruhan instansi. Evaluasi hasil kerja yang dilaksanakan terkait sinkronisasi sistem, Pengusulan kebijakan yang mendukung pembangunan sistem. Dengan sarana berupa legislasi peraturan serta perundang-undangan, Keputusan Presiden, Peraturan Menhan, Peraturan Panglima, serta instansi terkait dimasing-masing *stakeholder*, penggunaan kebijakan sistem yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dalam rangka Optimalisasi data pemetaan dan informasi bertujuan untuk pembangunan daerah tersebut dengan maksimal agar sejalan dengan dengan kepentingan nasional pengintegrasian atau membangun *database* yang memiliki kemampuan besar dalam menampung data informasi geospasial adalah sebagai berikut:

tugas ditentukan oleh SDM dan strategi dalam mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat dilaksanakan sebagai penjabaran strategi adalah sebagai berikut:

- a. *Ends*. Interoperabilitas peralatan antar instansi yang mempunyai format data yang sama dengan tingkat teknologi yang sama.
- b. *Means*. Upaya-upaya yang dilakukan melalui optimalisasi data pemetaan dan informasi melalui pembuatan regulasi dan peranti lunak terkait pemberdayaan tata ruang laut, pengajuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan desain tata ruang laut, pengajuan Keppres atau Perpres untuk mengatur susunan organisasi yang merupakan sinergi dari *stakeholder*, dan melaksanakan *Update* perkembangan dan informasi dalam kemampuan dan kekuatan kewilayahan dengan Metode analisa sistem data agar dapat mengikuti perkembangan piranti teknologi pada masing-masing *stakeholder*, Peningkatan pada kemampuan integrasi data, Pembangunan dan penetapan *database* yang memiliki
- c. *Ways*. Cara untuk mencapai tujuan dilaksanakan dengan:
 - a) Pembuatan regulasi dan peranti lunak terkait pemberdayaan tata ruang laut agar dapat mendorong seluruh *stakeholder* untuk bersama-sama bersinergi dalam upaya pembangunan *database* dengan melakukan integrasi data dalam satu organisasi yang memiliki kemampuan dan kapabilitas baik infrastruktur maupun sdm,
 - b) Pengajuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan desain tata ruang laut yang mengatur secara tegas pemberdayaan tata ruang laut di Koarmada I guna mendukung pembangunan postur TNI dalam rangka mewujudkan keamanan dan kesejahteraan NKRI.

c) Pengajuan Keppres atau Perpres untuk mengatur susunan organisasi yang merupakan sinergi dari *stakeholder*, Dengan pengajuan Keppres atau Perpres maka pemberdayaan tata ruang laut di Koarmada I guna mendukung pembangunan postur TNI dalam rangka mewujudkan keamanan dan kesejahteraan NKRI.

d) Melaksanakan *Update* perkembangan dan informasi dalam kemampuan dan kekuatan kewilayahan dalam upaya menjaga profesionalitas dan konsistensi sesuai dengan perkembangan dan perubahan regulasi, peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemberdayaan tata ruang Laut di Koarmada I saat ini yang dibutuhkan adalah yang memiliki kompetensi dibidang pemberdayaan tata ruang dan bidang *Cartography dan Marine Analysis (Marine Cartography)*, oleh karenanya perlu upaya peningkatan kompetensi SDM. Pembangunan sistem informasi bagi pemberdayaan tata ruang laut di Kormada I saat ini belum terpenuhi, diperlukan strategi pemberdayaan tata ruang laut yang dapat ditempuh melalui 4 strategi, yaitu Optimalisasi data pemetaan dan informasi, mewujudkan sarana prasarana sesuai kondisi geografis Indonesia, Meningkatkan sumber daya manusia TNI serta mengoptimalkan kerja sama dan partisipasi semua *stakeholder* kelautan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bappenas (2016) *Prakarsa Strategis Optimalisasi Pemanfaat Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Ringkasan Laporan. Jakarta. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas/BPPN.

- Deni Andriana. (2021). "Triangulasi dan Keabsahan Data," Kategori Tulisan : [Research Methods](#)
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008) *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- lin Tri Rahayu dan Triastiadi Ardani. (2004). *Obsevasi dan Wawancara* (Malang: Bayumedia).
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pertahanan. (2008). "Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Ancaman Tahun 2008," Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis.
- Lanya, Indayati dan Subadiyasa, Netera N. (2012). Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 12, nomor 11 April 2012.
- Lemhanas. (2015). *Studi Konsepsi Ketahanan Nasional/Lembaga Ketahanan Nasional RI (PPSA) LIII*.
- Lykke, Jr., Arthur F. (2001) *Toward an Understanding of Military Strategy*, II U.S. Army War College: Guide to Strategy, ed. Joseph R. Cerami dan James F. Holcomb, Jr., Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute, 2001
- Lexi J. Moelong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung. Peenrbit Remaja Rosdakarya
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2003). *Tinjauan Aspek Penataan Ruang dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir*, Jakarta.
- Mulyono. (2009). *Optimalisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Semesta*, Jurnal

- Yudhagama, Vol. 1, No. 245, Tahun 2009, hal. 27.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (2018). *Rujukan Nasional Data Kewilayahan Indonesia*, Jakarta. Penerbit Pushidrosal.
- Sisriadi (2016) *Pengembangan postur pertahanan militer guna mendukung terwujudnya poros maritim dunia*. Majalah Wira. Jakarta. Vol. 59 No. 43 Kementerian Pertahanan RI
- Soewarso. (1982). "Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional", Jakarta. Penerbit Genep Jaya
- Sofar Silaen dan Widiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Jakarta : In Media.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Suradinata E. (2013). *Hukum dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka NKRI*, Jakarta. PT Suara Bebas.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung. Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tatang M. Amirin. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufiqurroham A (2016) *Kepemimpinan Maritim*. Yogyakarta. Penerbit Pandiva Buku
- Thibault Josse, Marthin Hadiwinata, Henrikus Pratama, Zoe W. Brent, and Mads Barbesgaard (2019) *Perencanaan Tata Ruang Laut: Menyelesaikan atau memperkuat konflik di atas dan di ruang laut?*. Amsterdam. Transnational Institute = www.TNI.org July 2019
- Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo RR, Dwijowiyoto RN (2007) *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta. Elekmedia Komputindo
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusup (2014) *Optimalisasi pertahanan negara guna mengantisipasi dampak konflik Laut Cina Selatan*. Kertas Karya Perorangan Dikreg PPRA LI. Jakarta. Lemhanas RI

JURNAL

- Sujadmi dan Bahjatul Murtasidin (2021) *Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 5, Nomor 2, Juni Tahun 2020
- Tri Subagyo, Edy Suhardono Bambang Saharjo (2020) *Implementasi kebijakan wilayah pertahanan laut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* Volume 6 Tahun 1 Tahun 2020
- Priyanta M (2021) *Implikasi Konsep Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*. *Jurnal Wawasan Yuridika* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021.
- Wilda Prihatingtyas (2019) *Pengelolaan Wilayah Laut oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance* *Jurnal Media Iuris* Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2021 tentang

Kebijakan Umum Pertahanan
Negara Tahun 2020- 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2019, tentang Rencana Tata Ruang
Laut.

Keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/555/VI/2018 Tentang Doktrin
Tentara Nasional Indonesia Tri
Dharma Eka Karma.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut
Nomor Kep/2639/VII/2018 tanggal
23 Juli 2018 tentang Pemberdayaan
Wilayah Pertahanan Laut.